

BAB I

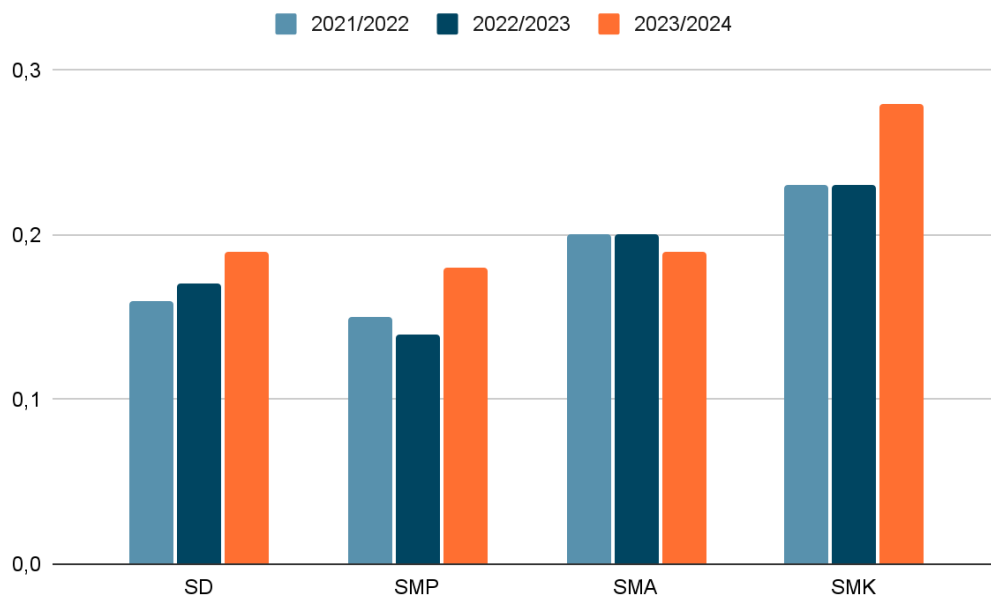
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang, masih menghadapi permasalahan yang cukup serius dalam aspek pendidikan. Dimana masalah tersebut didukung dengan masih banyaknya anak yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan formal sehingga menyebabkan semakin rendahnya angka partisipasi anak dalam pendidikan. Tentunya, berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam rencana strategis 2020 – 2024 menciptakan suatu kebijakan dalam mengoptimalkan angka partisipasi pendidikan.¹ Adapun kondisi yang ingin dicapai oleh Kemendikbud pada saat itu sejalan dengan upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan dini dan tinggi, yang juga didukung dengan tuntasnya wajib belajar sembilan tahun serta meningkatnya wajib belajar dua belas tahun. Hal tersebut diupayakan salah satunya melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah untuk meningkatkan daya tampung pada setiap jenjangnya. Namun, pada realitanya, permasalahan terkait rendahnya angka partisipasi pendidikan masih menjadi tantangan tersendiri bagi negara yang memerlukan upaya lebih lanjut untuk segera dibenahi.

¹ Fitria Madaniah. (2023). Sebab Akibat Banyak Anak di Indonesia yang Putus Sekolah. *Student Research Journal* , 1 (1): 418-424.

Skema 1.1 Persentase Angka Anak Putus Sekolah di Indonesia Tahun Ajaran 2021/2022, 2022/2023, dan 2023/2024



Sumber: Diolah dari data GoodStats, 2025²

Dari Skema 1.1 terlihat bahwa angka anak putus sekolah pada setiap jenjang mengalami peningkatan. Jenjang sekolah dasar (SD) mengalami peningkatan pada tiga tahun ajaran berturut-turut, yaitu 0,16% pada 2021/2022, 0,17% pada 2022/2023, dan 0,19% pada 2023/2024. Jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sempat mengalami penurunan dari 0,15% pada 2021/2022 menjadi 0,14% pada 2022/2023, dan kembali meningkat menjadi 0,18% pada 2023/2024. Jenjang sekolah menengah atas (SMA) mengalami stagnan di angka 0,2% pada 2021/2022 dan 2022/2023, lalu menurun sedikit menjadi 0,19% pada 2023/2024. Yang terakhir, yaitu jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) mengalami stagnan di angka 0,23% pada

² Data Angka Anak Putus Sekolah di Indonesia Tahun Ajaran 2021/2022, 2022/2023, dan 2023/2024 bersumber dari GoodStats, “Perkembangan Angka Anak Putus Sekolah di Indonesia berdasarkan Jenjang Pendidikan”, data.goodstats.id, 2024.

2021/2022 dan 2022/2023, lalu mengalami peningkatan menjadi 0,28% pada 2023/2024.

Masih tingginya angka anak putus sekolah merupakan masalah jangka panjang yang sangat kompleks sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk segera diatasi oleh berbagai pemangku kepentingan, salah satunya, yaitu pemerintah. Hal tersebut karena pendidikan berperan penting dalam menciptakan generasi bangsa yang lebih baik di masa depan. Dalam hal ini, pendidikan merupakan pondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, setiap individu tidak hanya mendapat keterampilan dan pengetahuan. Akan tetapi, setiap individu juga ditanamkan dengan nilai moral dan etika yang dapat membentuk karakter mereka. Dengan demikian, setiap individu dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan setelah menempuh jenjang pendidikan, yang secara tidak langsung turut menentukan taraf hidup dan kesejahteraan mereka di masa yang akan datang.

Individu yang berkualitas tentunya diciptakan dari pendidikan yang berkualitas juga. Pendidikan akan menyiapkan individu dengan berbagai bekal agar mampu beradaptasi dan bersaing di zaman yang semakin kompleks ini. Sumber daya manusia yang diciptakan dari pendidikan ini akan turut mendorong secara optimal pembangunan negara. Hal ini karena setiap individu berkontribusi secara aktif pada masyarakat dengan menggerakkan setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi investasi bagi individu itu sendiri,

tetapi secara tidak langsung juga menjadi investasi bagi masa depan bangsa yang secara tidak langsung berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya pertimbangan yang berfokus pada faktor internal dan eksternal sebagai penyebab anak yang harus putus sekolah.³ Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak, yaitu mencakup rendahnya minat dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini karena anak-anak memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya pendidikan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan luar anak, yaitu mencakup rendahnya perekonomian keluarga, lingkungan pergaulan anak yang tidak mendukung, dan adanya kebijakan dalam pendidikan yang seringkali menyebabkan tidak meratanya kesempatan dalam mengakses pendidikan formal.

Dalam menjawab tantangan yang kompleks ini, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh lapisan masyarakat. Perwujudan ini penting untuk diupayakan agar setiap individu dengan berbagai latar belakang dan kondisi, baik sosial, ekonomi, maupun budaya mendapat kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan.⁴ Hal tersebut juga secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf hidup individu tersebut.

³ Ayu Y. B.L., Fariz K., & Rifal B. A. (2020). Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Ilmu Sekolah Dasar*, 4 (2): 299-308.

⁴ Endry Setiawan, dkk. (2024). Pemerataan Akses Pendidikan. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, 2 (4): 29-38.

Adapun salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pemerataan akses pendidikan ini, yaitu dengan didirikannya alternatif dari sekolah formal reguler yang beroperasi melalui konsep sekolah terbuka.

Sekolah terbuka merupakan sub-sistem dari lembaga pendidikan formal bagi anak yang menghadapi kendala dalam melanjutkan pendidikan di sekolah reguler. Sekolah terbuka dirintis pada tahun 1979 dengan sekolah menengah pertama terbuka (SMPT) pertama. Namun, sekolah terbuka baru dirintis di DKI Jakarta pada tahun 1990-an.⁵ Sekolah terbuka menekankan pada konsep fleksibilitas dalam kegiatan belajar-mengajarnya, dimana pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Selain itu, kegiatan belajar-mengajar dilakukan di sekolah reguler yang berfungsi sebagai induk dari sekolah terbuka sehingga para siswa tetap dapat merasakan lingkungan pendidikan yang terintegrasi. Dalam hal ini, tenaga pengajar atau yang disebut sebagai guru bina sekolah terbuka berasal dari sekolah induk.

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) di DKI Jakarta Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020

< 2018		2018/2019		2019/2020		2024/2025	
> 30	100%	26	86,67%	22	73,33%	10	33,33%

Sumber: Olah Data Peneliti, 2025.

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah sekolah menengah pertama terbuka (SMPT) mengalami penurunan yang signifikan. Dalam waktu kurang lebih enam tahun ajaran, setidaknya lebih dari 20 SMPT ditiadakan.

⁵ Hastuti, dkk. (2024). Kajian Penyelenggaraan SMP Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Laporan Penelitian SMERU*.

Penurunan jumlah SMPT yang tergolong drastis tersebut disebabkan karena minimnya jumlah siswa sehingga pengelolaan sekolah pun menjadi tidak efisien. Kondisi tersebut menggambarkan semakin rendahnya minat terhadap sekolah terbuka. Dalam kata lain, kebutuhan masyarakat akan kehadiran sekolah terbuka semakin berkurang. Dengan demikian, hingga pada tahun 2025 ini, hanya terdapat 10 sekolah terbuka yang masih beroperasi. Sekolah tersebut masing-masing mempertahankan perannya yang sangat penting sebagai upaya pemberian pendidikan yang bermutu, khususnya terhadap anak-anak yang terkendala dalam memasuki sekolah reguler. Salah satu contoh sekolah terbuka yang masih bertahan dan beroperasi dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga pendidikan formal, yaitu terdapat pada SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur.

SMP Terbuka Cakung 1 ini sendiri merupakan sekolah yang berinduk di SMP Negeri 138 Jakarta Timur dan berlokasi di Jalan P. Komarudin RT. 13 RW. 05 Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur 13930. Upaya pemerintah dalam menciptakan kesetaraan pendidikan dengan masih beroperasinya beberapa SMP Terbuka patut diapresiasi karena sebagai bentuk komitmen untuk memastikan setiap anak dari berbagai latar belakang dapat mengakses pendidikan formal. Hingga pada tahun 2025, SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur masih bertahan dengan yang pada tahun ini memiliki kurang lebih 95 peserta didik yang terbagi ke dalam kelas tujuh, delapan, dan sembilan. Dimana seluruh peserta didik tersebut merupakan anak-anak yang tidak dapat memasuki sekolah reguler karena berbagai faktor, seperti adanya sistem

zonasi atau usia yang diterapkan oleh sekolah negeri, tidak memiliki prestasi yang signifikan, serta terbatasnya perekonomian keluarga.

Masih bertahannya SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur menunjukkan masih tingginya animo masyarakat terhadap kehadiran sekolah ini yang memang dikhususkan untuk anak-anak yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Pada kenyataannya, masyarakat di wilayah Cakung masih membutuhkan SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur sebagai sekolah yang dapat diakses oleh anak-anak tersebut. Selain itu, SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur tidak hanya memberikan materi pembelajaran yang teoritis kepada peserta didiknya. SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur memiliki satu aspek lain yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikannya, yaitu agenda *life skill*. Agenda *life skill* membekali keterampilan kepada peserta didik dengan memberikan pembelajaran yang aplikatif. Agenda ini dapat mendukung pengembangan potensi diri mereka secara lebih luas sehingga dapat menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Agenda ini penting untuk dilakukan oleh sekolah seperti SMP Terbuka SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur yang membuka akses lebih luas dan relevansi pendidikan bagi latar belakang peserta didik yang beragam.

Dalam uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik dan ingin mengkaji SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur dalam konteks perannya sebagai sub-sistem dari lembaga pendidikan formal dalam upaya pemerataan akses terhadap pendidikan formal. Dengan mengidentifikasi peran SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur sebagai pendidikan formal

kesetaraan akses, peneliti diharapkan dapat mengeksplorasi efektivitas kebijakan ini dalam mencapai tujuan akses terhadap pendidikan yang setara. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti peran SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur dengan judul **“Peran Pendidikan Formal sebagai Kesetaraan Akses: Studi Pada SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur”**.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, angka partisipasi pendidikan kembali meningkat pada seluruh jenjang pada periode tahun 2023/2024. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam rencana strategis 2020 – 2024 yang menciptakan suatu kebijakan dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan dini dan tinggi, yang juga didukung dengan tuntasnya wajib belajar sembilan tahun serta meningkatnya wajib belajar dua belas tahun. Dimana hal tersebut diupayakan salah satunya melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah untuk meningkatkan daya tampung pada setiap jenjangnya. Kondisi ini mencerminkan kesempatan bagi anak usia sekolah dalam mengakses pendidikan formal masih terbatas.

Namun, di sisi lain, terdapat SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur yang hadir sebagai lembaga pendidikan formal yang membuka akses yang lebih luas kepada anak usia sekolah yang mengalami berbagai hambatan dalam mengakses sekolah reguler. SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur masih bertahan dan beroperasi hingga saat ini bersama 9 SMP Terbuka

lainnya di Jakarta. Sedangkan SMP Terbuka lainnya sudah tidak dapat beroperasi karena tidak memiliki peserta didik lagi. Kondisi ini secara tidak langsung menggambarkan hadirnya SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur masih memiliki antusiasme dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat wilayah Cakung yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada peran SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur sebagai lembaga pendidikan formal yang berfokus pada kesetaraan akses. Dalam konteks ini, peran SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur sebagai lembaga pendidikan formal kesetaraan akses juga tidak luput dari tantangan dan strateginya selama beroperasi hingga saat ini. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur sebagai lembaga pendidikan formal kesetaraan akses?
2. Bagaimana peran SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur dalam pelaksanaan kesetaraan sebagai lembaga pendidikan formal melalui Teori Pendidikan Pembebasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dijabarkan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur sebagai lembaga pendidikan formal kesetaraan akses.

2. Mendeskripsikan peran SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur dalam pelaksanaan kesetaraan sebagai lembaga pendidikan formal melalui Teori Pendidikan Pembebasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi, baik secara akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

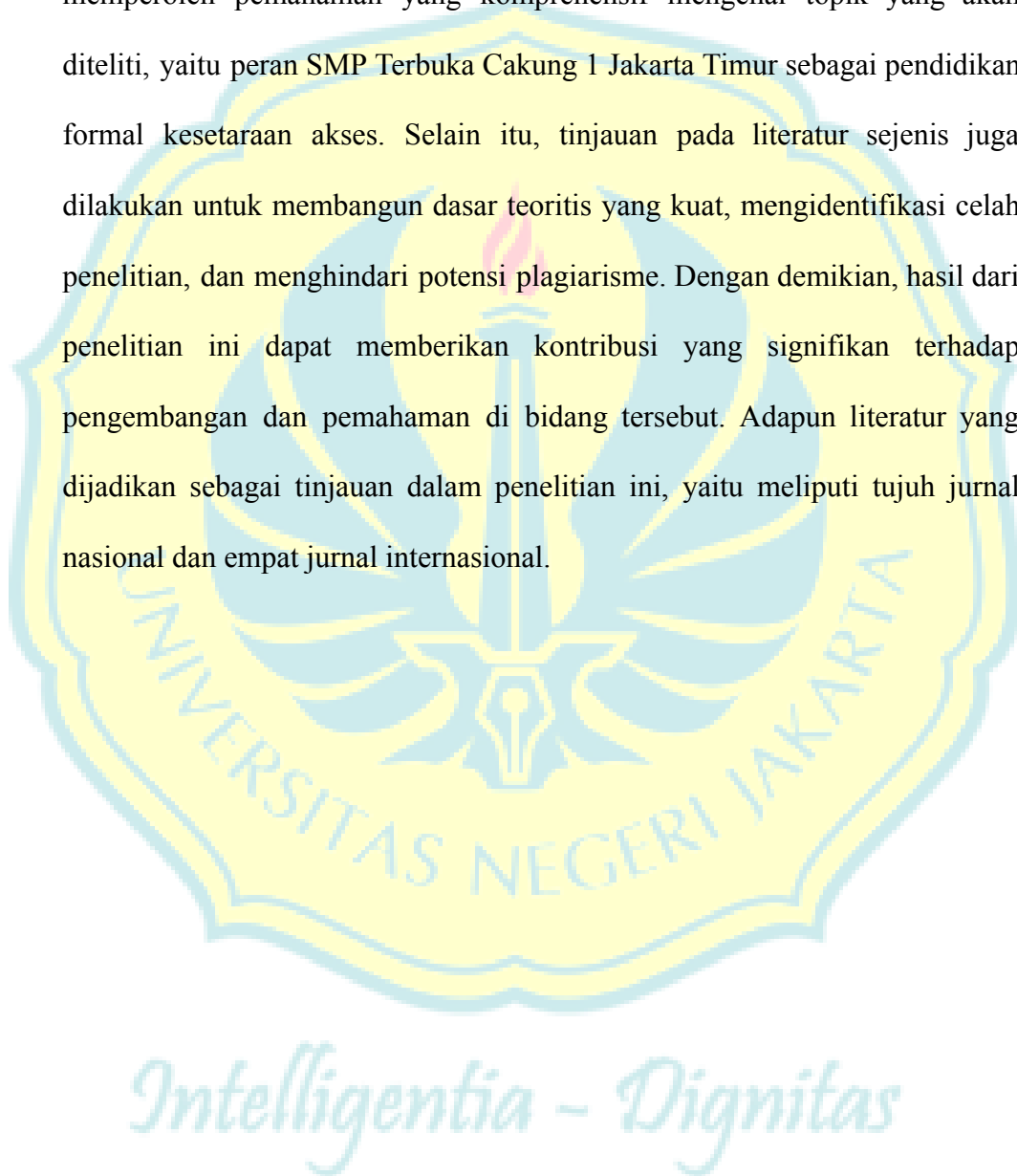
- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu Sosiologi Pendidikan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki permasalahan yang relevan.

2. Manfaat Praktis

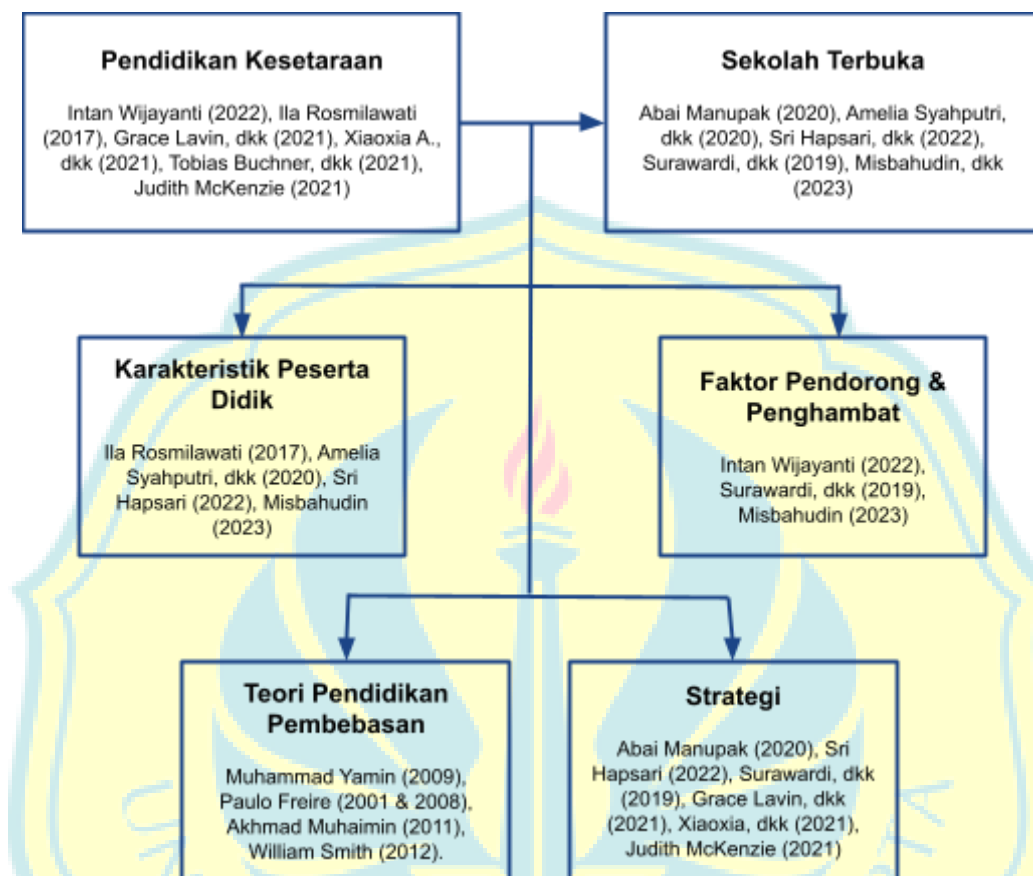
- a. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan kepada berbagai pemangku kepentingan mengenai sistem pendidikan, terutama pada pendidikan formal untuk kesetaraan akses.
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai pemerataan akses pendidikan dengan adanya pendidikan formal kesetaraan akses.

1.5 Tinjauan Literatur Sejenis

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan yang mendalam terhadap beberapa literatur yang relevan dan kredibel. Hal ini dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang akan diteliti, yaitu peran SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur sebagai pendidikan formal kesetaraan akses. Selain itu, tinjauan pada literatur sejenis juga dilakukan untuk membangun dasar teoritis yang kuat, mengidentifikasi celah penelitian, dan menghindari potensi plagiarisme. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan dan pemahaman di bidang tersebut. Adapun literatur yang dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini, yaitu meliputi tujuh jurnal nasional dan empat jurnal internasional.



Skema 1.2 Tinjauan Literatur Sejenis



Sumber: Olah Data Peneliti, 2025.

Pertama, penelitian oleh Intan Wijayanti dengan judul “*Program Pendidikan Kesetaraan Paket A sebagai Pendidikan Alternatif di Lingkungan Pesantren*”.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami program pendidikan kesetaraan Paket A sebagai pendidikan alternatif di dalam pesantren Ma’had Ibnu Ali. Penelitian ini menjelaskan bahwa program pendidikan kesetaraan Paket A di PKBM Ibnu Ali Ma’had Ibnu Ali bertujuan untuk memfasilitasi siswanya dalam memperoleh

⁶ Intan Wijayanti. (2022). Program Pendidikan Kesetaraan Paket A sebagai Pendidikan Alternatif di Lingkungan Pesantren. *Jurnal Premiere*, 4 (2): 27-39.

pendidikan umum yang dianggap optimal sebagai pendidikan alternatif yang mendukung pengetahuan umum siswa. Program pendidikan kesetaraan Paket A di PKBM Ibnu Ali memiliki kurikulum yang adaptif, fleksibel, dan mandiri. Dengan demikian, kebutuhan pendidikan siswa terpenuhi dan Ma'had Ibnu Ali dapat mempertahankan identitasnya sebagai pesantren penghafalan Al-Qur'an.

Kedua, penelitian oleh Abai Manupak Tambunan dengan judul “*Strategi SMP Terbuka dalam Meningkatkan Mutu*”.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kinerja dan layanan SMP Terbuka guna meningkatkan kualitas dengan keunggulan yang berbeda dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Penelitian ini menjelaskan bahwa SMP Terbuka dapat menggunakan berbagai strategi dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengembangkan karakteristik khasnya. Strategi yang dimaksud adalah strategi naturalisasi, yang ditandai dengan konsep beradaptasi dengan kondisi yang dianggap berhasil menjangkau segmen-segmen bawah masyarakat dengan merancang pola pendidikan yang memperhatikan keadaan siswa, dengan harapan menjadi acuan bagi sekolah-sekolah terjangkau dengan fasilitas pelatihan keterampilan, yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kualitas. SMP Terbuka memiliki potensi untuk tetap konsisten dalam keberadaannya di

⁷ Abai Manupak T. (2020). Strategi SMP Terbuka dalam Meningkatkan Mutu. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7 (1): 65-72.

masa depan karena memiliki visi yang kuat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan keunikan yang dimiliki dari ciri khasnya.

Ketiga, penelitian oleh Ila Rosmilawati dengan judul “*Jalan Panjang Menuju Sekolah Alternatif: Refleksi Pengalaman Remaja Kurang Beruntung dalam Meraih Pendidikan*”.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep perspektif transformatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana remaja yang kurang mampu dapat kembali ke sekolah melalui jalur pendidikan alternatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada empat kelompok remaja kurang mampu yang kembali ke sekolah melalui jalur atau metode yang berbeda, yaitu siswa drop-in-drop-out, siswa cuti, siswa yang diterima kembali, dan siswa yang aktif pindah sekolah. Berbagai cara dan jalur untuk mengakses pendidikan menunjukkan bahwa sistem pendidikan kesetaraan bersifat inklusif. Dari perspektif remaja, berbagai jalur yang mereka ambil untuk mendapatkan pengalaman pendidikan menunjukkan bahwa remaja yang kurang beruntung masih mampu mengembangkan agensi dan kontrol atas diri mereka sendiri ketika mereka memutuskan untuk kembali ke sekolah. Keputusan remaja untuk mengejar pendidikan melalui jalur non-formal menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan dapat memungkinkan mereka untuk bertransformasi melalui proses pembelajaran.

⁸ Ila Rosmilawati. (2017). Jalan Panjang Menuju Sekolah Alternatif: Refleksi Pengalaman Remaja Kurang Beruntung dalam Meraih Pendidikan. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah*, 2 (1): 102-111.

Keempat, penelitian oleh Amelia Syahputri dan Sulian Ekomila dengan judul “*Sekolah Menengah Pertama Terbuka sebagai Solusi Alternatif Pendidikan bagi Masyarakat di Kota Binjai*”.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menggambarkan karakteristik dan latar belakang siswa, organisasi dan proses siswa, serta pandangan masyarakat tentang penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Terbuka di Binjai Utara, khususnya mengenai tantangan yang dihadapi siswa. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat miskin merasa sangat terbantu oleh berbagai kemudahan, seperti pembebasan dari biaya sekolah dan beasiswa yang diterima oleh setiap siswa dari pemerintah. Ini karena para siswa Sekolah Menengah Pertama Terbuka di Binjai Utara, Kota Binjai, adalah anak yatim, setengah yatim, dan beberapa di antaranya adalah keduanya, yang tinggal bersama anggota keluarga dekat seperti kakek-nenek atau kerabat lainnya. Selain itu, sekolah dilaksanakan pada sore hari, memberikan keuntungan lain bagi siswa yang bekerja paruh waktu untuk bekerja sebelum dan setelah sekolah. Ini menegaskan bahwa Sekolah Menengah Pertama Terbuka memang merupakan solusi pendidikan alternatif bagi masyarakat di Kota Binjai.

Kelima, penelitian oleh Sri Hapsari, Nurul Syifa, Nur Amega Setiawati, dan Abdul Munir dengan judul “*Upaya Pemerataan Pendidikan*

⁹ Amelia S., & Sulian E. (2020). Sekolah Menengah Pertama Terbuka sebagai Solusi Alternatif Pendidikan bagi Masyarakat di Kota Binjai. *Jurnal Pendidikan Antropologi*, 2 (1): 14-19.

bagi Anak Yatim dan Dhuafa di SMA Terbuka".¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami upaya yang dilakukan oleh SMA Terbuka Yayasan Insan Guna dalam menyediakan pendidikan sekolah menengah atas melalui Yayasan Insan Guna. Penelitian ini menguraikan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat, yaitu penyediaan fasilitas belajar, peningkatan jumlah siswa, penawaran kesempatan belajar, dan pemeliharaan kualitas pendidikan. Misi sosial sekolah ini dibuktikan dengan tidak memungut biaya dari anak yatim piatu dan kaum kurang mampu serta membina ketahanan mental mereka agar tidak merasa tidak nyaman dengan keadaan mereka saat ini. SMA Terbuka Insan Guna juga mengadakan acara amal untuk anak yatim piatu dan kaum kurang mampu. Selain itu, upaya juga dilakukan terhadap pendidik dengan meningkatkan inovasi pengajaran guru, yaitu dengan memberikan pelatihan teknologi dan informasi dalam pembelajaran bagi guru.

Keenam, penelitian oleh Surawardi dan M. Adly Nurul Ihsan dengan *"Pembinaan terhadap Anak Putus Sekolah melalui Program Sekolah Terbuka di SMP Terbuka Kota Banjarmasin"*.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bentuk-bentuk bimbingan

¹⁰ Sri H., Nurul S., dkk. (2022). Upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Yatim dan Dhuafa di SMA Terbuka. *Jurnal Sosio e-Kons*, 14 (3): 309-314.

¹¹ Surawardi, & M. Adly N. I. (2019). Pembinaan terhadap Anak Putus Sekolah melalui Program Sekolah Terbuka di SMP Terbuka Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 13 (2): 329-344.

bagi anak putus sekolah melalui program Sekolah Terbuka di Sekolah Menengah Pertama Terbuka di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menjelaskan bahwa bimbingan untuk anak putus sekolah di Sekolah Menengah Pertama Terbuka di Kota Banjarmasin mencakup penyediaan keterampilan seperti kerajinan tekstil, keterampilan dalam memanfaatkan barang bekas, keterampilan kuliner, dan keterampilan informatika; pengenalan dan penanaman nilai-nilai agama; serta penyediaan pendidikan umum dan agama sesuai dengan kurikulum intrakurikuler. Selain itu, ada faktor-faktor yang menghambat dan mendorong anak putus sekolah, yaitu banyak keluarga yang masih tidak menyadari pentingnya pendidikan wajib 9 tahun, semua keluarga siswa berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah, dan lingkungan tempat tinggal siswa kurang mendukung dalam hal pendidikan.

Ketujuh, penelitian oleh Misbahudin, Iwan Setiawan, dan Muhammad Nurcholis dengan judul “*Implementasi Kebijakan Sekolah Terbuka di SMP Terbuka 1 Pangatikan Kabupaten Garut*”.¹² Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan sekolah terbuka di SMP Terbuka 1 Pangatikan, Kabupaten Garut. Penelitian ini menjelaskan bahwa karakteristik masalah termasuk tidak semua anggota masyarakat menerima 9 tahun pendidikan dasar, banyak anak putus sekolah karena status ekonomi orang tua yang rendah, dan di sisi lain, mereka memiliki keterbatasan waktu yang menghalangi mereka untuk bersekolah;

¹² Misbahudin, Iwan S., & Muhammad N. (2023). Implementasi Kebijakan Sekolah Terbuka di SMP Terbuka 1 Pangatikan Kabupaten Garut. *Jurnal Gunung Djati Conference Series*, 36: 508-517.

pengaruh lingkungan kebijakan seperti fasilitas yang disediakan oleh pejabat desa, lingkungan yang kondusif, strategi, dan keberadaan sekolah reguler; proses pembelajaran tampak pasif. Selama proses pembelajaran, siswa sering menciptakan suasana kelas yang tidak kondusif. Strategi dan metode pengajaran yang digunakan meliputi metode ceramah, penugasan banyak tugas dan kerja praktis; serta hasil belajar yang dicapai dalam bentuk prestasi akademik dan non-akademik.

Kedelapan, penelitian oleh Grace Lavin Francis, Carlos E. Lavin, Jessica Sanchez, dkk dengan judul *“Inclusive Education Definitions and Practices: Exploring Perspectives of Education Professionals in Mexico City”*.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk untuk meneliti bagaimana para profesional yang bekerja di sekolah-sekolah yang mengidentifikasi diri mereka sebagai sekolah inklusif di kota Meksiko. Penelitian ini memaparkan bahwa para peserta mendefinisikan atau menggambarkan pendidikan inklusif dalam beberapa cara, termasuk akses fisik dan pendidikan, sosialisasi, pengembangan pribadi, kesetaraan di antara siswa, dan paradigma yang membutuhkan refleksi terus-menerus. Para peserta juga menggambarkan berbagai strategi pendidikan inklusif yang terkait dengan budaya sekolah, harapan yang tinggi, dukungan administratif, pengembangan profesional, kolaborasi, evaluasi siswa, akomodasi dan modifikasi, dukungan paraprofesional, dan keterlibatan orang tua.

¹³ Grace L. F., Carlos E. L., Jessica S., etc. (2021). Inclusive Education Definitions and Practices: Exploring Perspectives Education Professionals in Mexico City. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 18 (1): 58-67.

Kesembilan, penelitian oleh Xiaoxia A. Newton, Jill Hendrickson Lohmeier, Shanna Rose Thompson, dkk dengan judul “*Rethinking Alternative Education Accountability Indicators: A Multilevel and Contextual Perspective*”.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur. Adapun Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk memberikan gambaran umum mengenai berbagai langkah akuntabilitas, baik yang diadopsi oleh program pendidikan alternatif lain di Amerika Serikat atau direkomendasikan untuk diadopsi oleh para ahli pendidikan dan kebijakan publik. Penelitian ini memaparkan bahwa upaya untuk mengembangkan sistem akuntabilitas bagi sekolah alternatif telah dilakukan di berbagai negara bagian. Proposal yang berargumen untuk mempertimbangkan pengaturan sekolah alternatif sudah jelas terlihat. Namun, proposal-proposal ini jarang mempertimbangkan indikator kontekstual yang penting untuk memahami hasil akademik siswa yang bersekolah di sekolah alternatif, meskipun kita mengakui jenis hasil bagi siswa sekolah alternatif yang mungkin melampaui indikator akademik. Indikator akuntabilitas yang ada dan yang diusulkan cenderung didorong oleh sistem yang dirancang untuk mengevaluasi sekolah tradisional. Dengan kata lain, meskipun mengakui perbedaan antara konteks sekolah tradisional dan alternatif, para pengusul masih beroperasi di bawah kerangka sistem akuntabilitas yang digunakan dalam sekolah tradisional yang cenderung terlalu bergantung pada indeks kuantitatif dan kriteria psikometrik kuantitatif untuk menilai kualitas

¹⁴ Xiaoxia A. N., Jill H. L., Shanna R. T., etc. (2021). Rethinking Alternative Education Accountability Indicators: A Multilevel and Contextual Perspective. *Performance Improvement Quarterly*, 34 (4): 455-489.

mereka (yaitu, data numerik yang biasanya dianggap sebagai bukti keras yang dinilai berdasarkan keandalan, validitas, dan sebagainya).

Kesepuluh, penelitian oleh Tobias Buchner, Michael Shevlin, Mary-Ann Donovan, dkk dengan judul “*Same Progress for All? Inclusive Education, the United Nations Convention on the Rights of Persons With Disabilities and Students With Intellectual Disability in European Countries*”.¹⁵ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengeksplorasi fenomena ini lebih mendalam dengan membandingkan beberapa tindakan terkait proses implementasi UNCPRD di tujuh negara Eropa. Penelitian ini memaparkan bahwa terdapat tren penempatan (sekolah umum dan sekolah khusus) siswa dengan Kebutuhan Pendidikan Khusus (SEN) secara umum dan siswa dengan cacat intelektual secara khusus. Peningkatan jumlah siswa yang diidentifikasi memiliki Kebutuhan Pendidikan Khusus (SEN) di sekolah umum dapat diamati di semua negara selama proses implementasi UNCPRD. Namun, dibandingkan dengan kelompok pelajar yang cukup luas ini, persentase siswa dengan cacat intelektual di lingkungan sekolah umum tidak meningkat sebanyak itu. Selain itu, perhitungan "tingkat eksklusi" mengungkapkan bahwa kelompok pelajar ini tetap menjadi populasi utama di sekolah-sekolah khusus. Hasil ini perlu

¹⁵ Tobias B., Michael S., Mary-Ann D., etc. (2021). Same Progress for All? Inclusive Education, the United Nations Convention on the Rights of Persons With Disabilities and Students With Intellectual Disability in European Countries. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 18 (1): 7-22.

dipahami sebagai dampak dari kekurangan spesifik dalam pelaksanaan UNCRPD.

Kesebelas, penelitian oleh Judith McKenzie dengan judul “*Intellectual Disability in Inclusive Education in South Africa: Curriculum Challenges*”.¹⁶

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengkaji kebijakan pendidikan inklusif di Afrika Selatan mempertimbangkan cacat intelektual sebagai salah satu dari banyak hambatan pembelajaran dalam undang-undang, pedoman, dan kurikulum terkait. Penelitian ini memaparkan bahwa pendidikan inklusif untuk pelajar dengan cacat intelektual di Afrika Selatan telah mengalami pergeseran dari satu kurikulum untuk semua dalam sistem pendidikan umum sebagai solusi yang relatif murah dan sederhana menjadi sistem yang rumit dengan tiga kurikulum yang berbeda. Saat ini, tidak jarang anak-anak dengan cacat intelektual yang kurang parah ditempatkan di pusat perawatan khusus di mana mereka mengikuti kurikulum terbatas karena ditolak oleh sekolah lokal mainstream. Jelas bahwa kustomisasi kurikulum sesuai dengan tingkat cacat intelektual adalah suatu latihan kompleks yang memprioritaskan kemampuan intelektual daripada keterampilan sosial dan rasa memiliki. Belum jelas pada titik ini apakah manfaat dari program pembelajaran yang ditargetkan akan lebih besar daripada kemungkinan eksklusi dan kesempatan untuk belajar dengan teman sebaya mereka yang berkembang secara norma.

¹⁶ Judith McKenzie. (2021). Intellectual Disability in Inclusive Education in South Africa: Curriculum Challenges. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 18(1): 53-57.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Kesenjangan Akses

Kesenjangan akses merupakan suatu prinsip dasar yang menekankan bahwa setiap individu atau warga negara memiliki peluang yang sama untuk memperoleh hak-hak dasarnya serta berbagai layanan penting dalam seluruh aspek pada kehidupan yang meliputi aspek sosial ekonomi, politik, dan lain-lain. Prinsip ini sangat krusial dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu terlepas dari latar belakang sosial, gender, ekonomi, kondisi fisik, dan lain-lain dapat menikmati layanan yang sama.¹⁷ Dengan mengedepankan kesetaraan akses juga sama dengan upaya mengurangi berbagai masalah yang berakar dari ketimpangan dan menciptakan lingkungan yang adil bagi semua.

Dalam pandangan sosiologis, pendidikan bukan hanya instrumen pembelajaran, melainkan juga institusi sosial yang berperan penting dalam pembentukan struktur sosial, mobilitas sosial, serta pemerataan kesempatan hidup yang lebih baik bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, persoalan akses pendidikan tidak dapat dipandang sebatas kuantitas, tetapi juga harus menyangkut kualitas dan keberdayaan yang diperoleh dari proses pendidikan itu sendiri.

Kesenjangan akses pendidikan juga menjadi salah satu elemen krusial

¹⁷ Wahida, S., Muh Akbar, & Nur R. M. (2024). Kesenjangan Akses Digital. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(1): 159-168.

dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam kajian sosiologi pendidikan, isu ini tidak hanya dipahami sebagai masalah administratif atau teknis, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkaitan erat dengan relasi kuasa, distribusi sumber daya, dan kebijakan publik.

Menurut Jonni Mardizal, Sanusi, Irsyad, dan Ali Ramatni (2024) dalam bukunya Sosiologi Pendidikan, pendidikan ini memiliki kapasitas untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas dan menawarkan solusi yang lebih efektif dalam memperbaiki sistem pendidikan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat masa kini. Dalam konteks ini, pendidikan tidak semata-mata menjadi sarana pencapaian akademik, tetapi juga menjadi ruang perjuangan sosial untuk menghapuskan ketimpangan dan diskriminasi. Menurutnya, akses dan kesetaraan dalam pendidikan menjadi indikator utama sejauh mana sistem pendidikan dapat memberikan layanan yang adil bagi seluruh warga negara. Mardizal dkk. menekankan bahwa akses dan kesetaraan pendidikan merupakan dua aspek fundamental dalam sosiologi pendidikan yang berkaitan langsung dengan keadilan sosial serta pembangunan masyarakat di tengah era digital dan kompleksitas tantangan kontemporer.¹⁸ Artinya, tanpa keadilan dalam akses pendidikan, keberlanjutan pembangunan sosial akan senantiasa terhambat oleh ketimpangan struktural.

¹⁸ Jonni M., Sanusi, Ali R., & Irsyad. (2024). Sosiologi Pendidikan. hlm. 91.

Pendidikan diyakini memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, asalkan mampu menjamin kesetaraan dalam akses dan kualitas bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam buku yang sama, ditegaskan bahwa kesetaraan akses pendidikan memiliki potensi besar sebagai alat transformasi sosial, karena dengan memberikan akses yang setara, pendidikan membuka jalan bagi mobilitas sosial dan pemberdayaan individu dari latar belakang yang terpinggirkan.¹⁹ Hal ini menjadi penting terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana pemisah antara kelompok yang memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas dan yang tidak, masih sangat mencolok, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri unggulan dan sekolah di wilayah tertinggal.

Lalu, menurut Soerjono Soekanto, setiap individu harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan itu, yang diwujudkan melalui tindakan afirmatif dan pemerataan pendidikan yang bermutu, baik di kota maupun desa, serta antara sekolah swasta dan negeri.²⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tidak cukup hanya dibuka secara formal melalui peraturan atau kebijakan, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk konkret yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pendidikan tidak boleh menjadi hak eksklusif kelompok tertentu yang

¹⁹ *Ibid.* hlm. 43.

²⁰ Soerjono Soekanto. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: *Rajawali Press*, cet. ke-4, hlm. 61.

memiliki keistimewaan sosial dan ekonomi, melainkan menjadi sarana yang adil dan merata bagi semua warga negara. Ia menyebutkan bahwa fungsi pendidikan berkaitan erat dengan struktur masyarakat, salah satunya adalah sebagai alat mobilitas sosial. Namun, bila akses terhadap pendidikan tidak merata, maka fungsi ini tidak akan berjalan.²¹ Dalam hal ini, pendidikan yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu justru akan memperkuat pelapisan sosial dan memperlebar ketimpangan antara kelas atas dan bawah.

Oleh karena itu, penting bagi negara dan penyelenggara pendidikan untuk mengimplementasikan adanya kebijakan afirmatif yang berpihak atau mengacu kepada kelompok-kelompok yang secara struktural termarjinalkan. Tindakan afirmatif dimaksudkan untuk memperbaiki ketimpangan akses yang terjadi, baik melalui bantuan biaya pendidikan, penyediaan fasilitas di daerah tertinggal, peningkatan kualitas tenaga pendidik di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), maupun melalui kurikulum yang inklusif dan kontekstual. Soekanto mengisyaratkan bahwa akses pendidikan yang setara harus disertai dengan pemerataan mutu, sehingga bukan hanya jumlah sekolah yang merata, tetapi juga kualitas pendidikan di setiap satuan pendidikan dapat dinikmati secara adil oleh semua kalangan.

Kesetaraan akses pendidikan juga harus dilihat dari sisi proses dan hasil. Dalam proses, semua peserta didik harus mendapatkan

²¹ *Ibid.* hlm. 58.

pelayanan yang setara, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi, gender, agama, atau lokasi geografis. Dalam hasil, setiap peserta didik harus memiliki peluang yang sama untuk sukses, baik dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia yang lebih kompleks, yaitu dunia kerja. Oleh sebab itu, indikator kesetaraan akses pendidikan tidak hanya mencakup angka partisipasi sekolah, tetapi juga kualitas guru, ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan siswa dalam menyelesaikan studi, serta hasil belajar yang setara antar kelompok sosial.

Kesetaraan akses merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini karena kesetaraan akses secara tidak langsung menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi diri mereka, tanpa dibatasi oleh latar belakang sosial, ekonomi, atau lainnya.²² Ketika akses terhadap segala aspek terbuka bagi semua, setiap individu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar dan tumbuh. Lalu, hal ini memungkinkan mereka untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara signifikan dalam berbagai bidang. Dengan demikian, individu-individu yang berhasil mengembangkan potensi diri mereka, terlepas dari latar belakangnya, dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pertumbuhan perekonomian

²² Amelia V., Imelda V. A., Juwita A. P., & dkk. (2024). Kesetaraan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila dalam Pemerataan Akses Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu*, 1(2): 44-57.

negara. Kesetaraan akses tidak hanya mengenai memberi kesempatan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendorong kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Kesetaraan akses terhadap pendidikan salah satunya diwujudkan melalui pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan merupakan suatu sarana yang memiliki tujuan untuk memperluas penyetaraan standar pendidikan yang sudah ada, baik pada jalur formal maupun nonformal. Pendidikan kesetaraan ini memiliki sasaran pada anak putus sekolah atau yang tidak mampu untuk bersekolah karena berbagai keterbatasan sehingga mereka dapat kembali bersekolah.²³ Adapun bentuk pendidikan kesetaraan, yaitu meliputi Program Paket A yang setara SD/MI, Program Paket B yang setara SMP/MTs, dan Program Paket C yang setara SMA/MA yang merupakan kebijakan dari pemerintah. Selain itu, juga terdapat Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikelola oleh masyarakat. Pendidikan kesetaraan diselenggarakan untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih luas tanpa adanya diskriminasi sehingga dapat menyiapkan diri dalam menghadapi kehidupan di masa depan serta mendorong pembangunan sosial dan ekonomi.²⁴

²³ Afif M., Achmad Z., & Bagus H. (2020). Peran Pendidikan Alternatif dalam Menanggulangi Siswa Putus Sekolah. *Jurnal Society*, 8 (2): 759-771.

²⁴ Zidhki M., Novia H., & Hasan B. (2025). Memahami Dinamika Pendidikan Kesetaraan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa: PKBM Rumah Pintar Karangharjo Silo Jember. *Sroedja: Jurnal Administrasi Sroedji*, 2 (1): 161-179.

Pada dasarnya, pemenuhan atas kesetaraan akses terhadap pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Negara bertanggung jawab dalam memberikan jaminan kepada setiap warganya agar dapat mengakses pendidikan sebagaimana diatur dalam kebijakan wajib belajar 12 tahun. Dalam konteks ini, pembiayaan atas pendidikan juga menjadi tanggung jawab negara sehingga pendidikan dapat diakses terlepas dari latar belakang ekonominya. Hal tersebut penting karena pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan tugas negara.²⁵ Pemerataan akses terhadap pendidikan oleh negara berarti upaya oleh negara agar setiap warga negaranya, baik di perkotaan maupun pelosok pedesaan memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, yang juga berarti bahwa anak-anak dari keluarga dengan perekonomian rentan memperoleh kesempatan yang setara seperti anak-anak dari keluarga dengan perekonomian tinggi. Dengan demikian, negara harus berkomitmen untuk menghapus segala diskriminasi dalam akses pendidikan sehingga semua lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari sistem pendidikan yang inklusif dan adil.

²⁵ Lukman H. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal EduTech*, 2 (1): 53-64.

Skema 1.3 Kesetaraan Akses dalam Pendidikan Formal



1.6.2 Penyelenggaraan Pendidikan oleh Negara

Penyelenggaraan pendidikan oleh negara telah diatur secara resmi dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut, tertera bahwa pendidikan merupakan suatu usaha pembelajaran yang dilakukan secara sadar sehingga para peserta didik dapat mengembangkan potensi dalam berbagai aspek, seperti keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang nantinya akan berguna baik bagi individu itu sendiri, masyarakat,

bangsa, dan negara. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengusahakan pendidikan yang berkualitas pada setiap warga negaranya.²⁶ Diusahakannya pendidikan pada setiap warga negara ini bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas.

Penyelenggaraan pendidikan oleh negara merupakan bagian integral dari pelayanan publik (*public service*) yang memiliki tujuan untuk memenuhi hak dasar setiap warga negaranya dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran sebagai penggagas atau pelaksana utama yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, mulai dari menyediakan dana, merumuskan regulasi, mengembangkan kurikulum, memfasilitasi pelatihan guru, hingga mengawasi mutu pendidikan.²⁷ Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa akses terhadap pendidikan tidak hanya tersedia, tetapi juga memenuhi standar yang diperlukan untuk menciptakan generasi yang kompeten dan berdaya saing. Selain itu, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator yang menetapkan standar atau kebijakan dalam pendidikan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan tersedianya sarana, prasarana, infrastruktur pendukung termasuk

²⁶ Angger Angelino. (2015). Peranan Pemerintah dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar di Kecamatan Matuari Kota Bitung. *Jurnal Ilmu Politik*, 1(7).

²⁷ Risma N., Muhammad N., & Nasaruddin H. Pelayanan Publik Dasar Bidang Pendidikan tentang Sarana dan Prasarana di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar.

pemanfaatan teknologi digital dalam memperluas akses terhadap pendidikan.

Pada hakikatnya, setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesetaraan terhadap pendidikan yang bermutu. Hak dalam memperoleh pendidikan ini juga sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, negara menjamin penyelenggaraan wajib belajar pada pendidikan formal minimal 12 tahun yang juga disertai dengan dibebaskannya biaya pendidikan.²⁸ Hal tersebut ditujukan untuk memastikan adanya kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan yang bermutu bagi segenap warga negara terlepas latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan tidak ada bagian dari masyarakat yang terpinggirkan atau terhalang dalam mengakses pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah.

Pendidikan formal ini sendiri merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik di bidang pendidikan dimana dikelola oleh lembaga pendidikan resmi dan diawasi oleh pemerintah. Jenis pendidikan ini diselenggarakan secara sistematis yang memiliki acuan pada kurikulum nasional yang dirancang oleh otoritas pendidikan dan diterapkan kepada seluruh jenjang pendidikan formal, mulai dari

²⁸ Samsul Hadi, Heru Arif, & Taufik Hidayat. (2023). Membedah Pendidikan Alternatif di Indonesia.

sekolah dasar, sekolah menengah, hingga sekolah tinggi.²⁹ Penyelenggaraan pendidikan formal tentunya didukung oleh beberapa pelayanan yang harus diberikan, yaitu meliputi ketersediaan tenaga pendidik yang profesional, pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi peserta didik, penyediaan fasilitas yang memadai, pelayanan administrasi, serta pelayanan khusus dan ekstrakurikuler. Selain itu, pembebasan biaya pendidikan juga menjadi pelayanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan formal.³⁰ Bahkan hingga saat ini, pemerintah telah melaksanakan program atau menyalurkan berbagai jenis bantuan pendidikan, yang meliputi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lain-lain.³¹

Namun, pada kenyataannya, kebijakan dan pelayanan yang terdapat di dalam pendidikan formal yang diupayakan dalam memberikan akses yang setara bagi setiap warga negara masih menunjukkan banyak anak yang kesulitan untuk bersekolah, dimana angka partisipasi terhadap pendidikan masih rendah bahkan banyak yang terpaksa harus putus sekolah. Oleh sebab itu, negara sempat mengembangkan sistem pendidikan formal ini untuk lebih menjangkau anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengakses

²⁹ Dimas Bagus, & Binti Maunah. (2023). Peran Lembaga Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Indonesia. *PENDIKDAS: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*; 4 (2): 17-26.

³⁰ Brian P. P., Gustaaf B. T., & Very Y. L. Pelayanan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

³¹ Peggy Dania. (2022). 5 Jenis Bantuan Pendidikan. Diakses dari tribunnews.com.

pendidikan formal yang disebabkan oleh berbagai faktor dengan menyelenggarakan sekolah terbuka.

Sekolah terbuka, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, merupakan suatu bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri dan menyelenggarakan pendidikannya dengan metodenya tersendiri, tetapi masih bagian dari sekolah induk.³² Sekolah terbuka merupakan pendidikan formal sebagai kesetaraan akses yang dirancang untuk anak-anak yang menghadapi berbagai kendala dalam mengikuti pembelajaran di sekolah reguler.³³ Hal tersebut disebabkan oleh banyak keluarga yang masih memiliki kendala dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, geografis, dan lain-lain.

Sekolah terbuka sebagai wujud konkret dari pendidikan layanan khusus dimana negara merancang sistem yang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Dalam hal ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah terbuka dilakukan secara terjadwal dengan tetap mengacu pada standar kurikulum nasional. Namun, meskipun mengacu pada kurikulum yang berlaku, sekolah terbuka tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan aturan yang seketat sekolah reguler.³⁴ Sekolah terbuka memiliki durasi pembelajaran yang relatif lebih singkat. Selain itu, kegiatan belajar

³² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.

³³ Pedoman Pengelolaan SMP Terbuka. (2020). Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan Menengah, serta Kemendikbud RI.

³⁴ *Ibid.*

mengajar juga disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan peserta didiknya. Hal tersebut memiliki tujuan sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal.

Penyelenggaraan sekolah terbuka sepenuhnya dibiayai oleh negara.³⁵ Dengan demikian, peserta didik tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bersekolah di sekolah terbuka, sebagai solusi bagi banyak anak yang masih terhalang beberapa faktor, salah satunya, yaitu ekonomi. Hal tersebut bertujuan untuk menjangkau lebih banyak anak dengan kesempatan pendidikan formal yang berkualitas. Tujuan ini juga sejalan dengan empat alternatif perluasan kesempatan belajar di Indonesia, yaitu mendirikan sekolah terbuka, membangun sekolah baru, menyelenggarakan pendidikan keterampilan, dan menambah daya tampung sekolah yang sudah ada.³⁶

Pada intinya, sekolah terbuka memiliki sistem yang sama dengan sekolah reguler. Sekolah terbuka melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan ujian yang mengacu pada kurikulum yang sama dengan sekolah reguler. Kegiatan belajar mengajar di sekolah terbuka juga dibimbing oleh guru bina yang merupakan guru reguler di sekolah induknya.³⁷ Selain itu, nama para peserta didik di sekolah terbuka tercatat sebagai siswa di sekolah reguler yang merupakan induknya. Dengan demikian, peserta didik di sekolah terbuka yang

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Nasrudin, Agus Setiawan, & Rahmad Hidayat. (2021). Konsep Pendidikan Sekolah Terbuka. *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan, dan Dakwah*, 17 (2): 1-9.

³⁷ Hastuti, Dyan Widyaningsih, dkk. (2024). Kajian Penyelenggaraan SMP Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. Laporan Penelitian SMERU No. 2.

telah menyelesaikan masa pendidikannya akan mendapat ijazah yang juga diberikan kepada peserta didik sekolah reguler.³⁸ Hal tersebut merupakan hak bagi setiap peserta didik di sekolah terbuka sebagai pendidikan formal kesetaraan akses, dimana tidak hanya memperluas akses terhadap pendidikan bagi anak yang memiliki berbagai kendala, tetapi juga menjamin mereka untuk diakui secara resmi oleh sistem pendidikan nasional.

Skema 1.4 Penyelenggaraan Pendidikan oleh Negara



Sumber: Olah Data Peneliti, 2025.

1.6.3 Teori Pendidikan Pembebasan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 menjelaskan pendidikan yang didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan kondisi

³⁸ Sudirman Siahaan. (2008). Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMA Terbuka): Sebuah Model Pendidikan yang Fleksibel. *Jurnal Teknodik*, 8 (2): 47-60.

belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya.³⁹ Tujuannya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, memiliki karakter yang baik, kecerdasan, budi pekerti yang luhur, serta kecakapan yang dibutuhkan untuk kehidupannya sebagai individu, anggota masyarakat, warga bangsa, dan negara.

Sedangkan secara bahasa, kata *pembebasan* berakar dari kata *bebas*, yang berarti kondisi di mana seseorang atau sesuatu tidak terikat, tidak terganggu, atau tidak terhambat, sehingga memiliki keleluasaan untuk bergerak, menyampaikan pendapat, bertindak, dan lain sebagainya. Berdasarkan arti tersebut, dapat disimpulkan bahwa *bebas* mengacu pada suatu kondisi yang memungkinkan sesuatu atau seseorang untuk bertindak sesuai kehendaknya sendiri, tanpa tekanan, paksaan, atau intervensi dari pihak luar manapun.⁴⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *pembebasan* adalah suatu proses atau kondisi yang menciptakan ruang bagi individu atau kelompok untuk hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri, mengembangkan potensi dirinya secara utuh, dan menentukan arah hidup tanpa tekanan atau dominasi dari luar. Dalam dimensi yang lebih luas, pembebasan bukan sekadar pelepasan dari belenggu fisik, melainkan juga pembebasan dari ketidaktahuan, ketergantungan,

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas, hlm. 34.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 104.

penindasan, serta berbagai bentuk keterbatasan yang menghambat otonomi individu dan kemanusiaannya.

Paulo Freire memandang bahwa esensi pendidikan adalah proses pembebasan, yakni membebaskan manusia dari rasa takut dan tekanan akibat dominasi kekuasaan yang menindas. Dalam pandangannya, pendidikan tidak boleh menjadi alat reproduksi penindasan, melainkan harus menjadi ruang emansipasi dimana peserta didik disadarkan akan realitasnya, diajak berpikir kritis, dan diberdayakan untuk mengubah keadaan.⁴¹ Pendidikan bagi kelompok yang terpinggirkan harus dirancang bersama mereka, bukan hanya diberikan kepada mereka, dalam upaya mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan yang telah direnggut. Pendidikan untuk kaum tertindas harus menjadi bagian dari perjuangan melawan para penindas dalam situasi di mana manusia dan dunia saling berinteraksi.⁴² Oleh karena itu, dalam perjuangan ini diperlukan suatu praktik yang merupakan proses berkelanjutan antara pemikiran kritis dan tindakan nyata. Salah satu elemen utama dalam gerakan pembebasan tersebut adalah peningkatan kesadaran diri.

Maka, menurut Paulo Freire, pendidikan pembebasan adalah sebuah perjalanan bagi setiap individu untuk menyadari dan meraih hal terpenting dalam hidupnya, yaitu melepaskan diri dari segala bentuk pengekangan yang membatasi hakikat kemanusiaannya,

⁴¹ Paulo Freire. *Pendidikan Kaum Tertindas*, Terjemahan F. Danuwinata. (2008). Jakarta: LP3ES, hlm. 27.

⁴² Paulo Freire. *Pendidikan yang Membebaskan*. (2001). Jakarta: MELIBAS, hlm. 1.

menuju kehidupan yang benar-benar merdeka dan penuh kebebasan.⁴³

Paulo Freire juga berpendapat pendidikan yang membebaskan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan sejati. Pendidikan harus menjadi sarana untuk membentuk pribadi yang sadar akan martabatnya sebagai manusia dan memiliki kebebasan dalam berpikir serta bertindak. Pendidikan semacam ini bukanlah pendidikan yang bersifat otoriter atau sekadar menanamkan pengetahuan secara satu arah, melainkan proses dialogis yang memanusiakan baik pendidik maupun peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan harus berperan sebagai jalan menuju pembebasan manusia dari struktur-struktur yang menindas, baik secara sosial, politik, maupun budaya. Lebih jauh, Freire menekankan bahwa tujuan utama dari pendidikan pembebasan adalah proses *humanisasi*, yakni menjadikan manusia semakin sadar akan nilai dirinya sebagai makhluk sosial. Humanisasi dalam pandangan Freire tidak hanya berfokus pada pencarian kebebasan individu secara sempit, melainkan pada kesadaran kolektif untuk membebaskan diri bersama-sama dari kondisi yang menindas.⁴⁴ Artinya, pendidikan harus mampu menumbuhkan kesadaran sosial bahwa kebebasan sejati tidak dapat dicapai secara individualistik, tetapi harus diwujudkan melalui solidaritas, keadilan, dan perjuangan bersama dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Dalam kerangka ini, pendidikan bukan sekadar alat mencapai

⁴³ Akhmad Muhaimin Azzet. *Pendidikan yang Membebaskan*. (2011). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 12.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 9.

mobilitas sosial, tetapi menjadi medium perjuangan menuju tatanan hidup yang lebih manusiawi bagi semua.

Dalam perkembangan intelektualnya, pemikiran Paulo Freire telah menjadi fondasi bagi sebuah “gerakan besar” yang dikenal sebagai *program pembebasan dari buta huruf sosial*. Gerakan ini lahir dari proses *penyadaran* yang telah dilakukan oleh Freire sendiri dan diteruskan oleh para pengikut serta simpatisannya di berbagai belahan dunia. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam pendekatan *pendidikan ulang* atau *re-edukasi* seperti yang pernah diterapkan di Tiongkok.⁴⁵ Karena proses penyadaran tidak bisa terjadi secara instan atau sekali waktu, maka pendidikan menjadi instrumen yang sangat vital untuk mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya secara berkelanjutan.

Freire membagi tingkat kesadaran manusia menjadi tiga kategori utama. Pertama, *kesadaran magis (magical consciousness)* di mana individu menerima kondisi kehidupan begitu saja tanpa mempertanyakan sebab-akibat sosial, sering kali dikaitkan dengan takhayul atau nasib. Kedua, *kesadaran naif (naïve consciousness)* yaitu kesadaran awal yang mulai melihat adanya masalah dalam kehidupan sosial, tetapi belum mampu memahami struktur penindasan secara mendalam; biasanya hanya menyalahkan individu, bukan sistem. Ketiga, dan paling tinggi, adalah *kesadaran kritis (critical*

⁴⁵ William A. S. *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, hlm. xi.

consciousness) tingkat di mana seseorang mulai memahami realitas secara struktural dan historis, serta terdorong untuk bertindak mengubah ketidakadilan yang ada. Dalam kerangka ini, tujuan akhir pendidikan adalah *humanisasi*, yaitu mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berpikir, merdeka, dan berdaya.⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak pernah netral ia selalu berada dalam ruang tarik menarik antara kepentingan kekuasaan dan kepentingan kemanusiaan. Oleh karena itu, pendidikan sejati harus berpihak pada pembebasan manusia, bukan pada pelestarian sistem yang menindas. Paulo Freire menekankan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang pembelajaran yang bersih dari intervensi politik atau kepentingan sempit apa pun yang berpotensi mencederai esensi pendidikan itu sendiri. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi kebebasan berpikir, tumbuh kembangnya pendidik, serta aktualisasi diri peserta didik tanpa tekanan dari kekuatan eksternal, baik dari kelompok politik, organisasi tertentu, maupun kepentingan sektarian.

⁴⁶ Mohammad Yamin. (2009). *Menggugat Pendidikan Indonesia : Belajar dari Paulo Freire dan K.H Dewantara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 148-149.

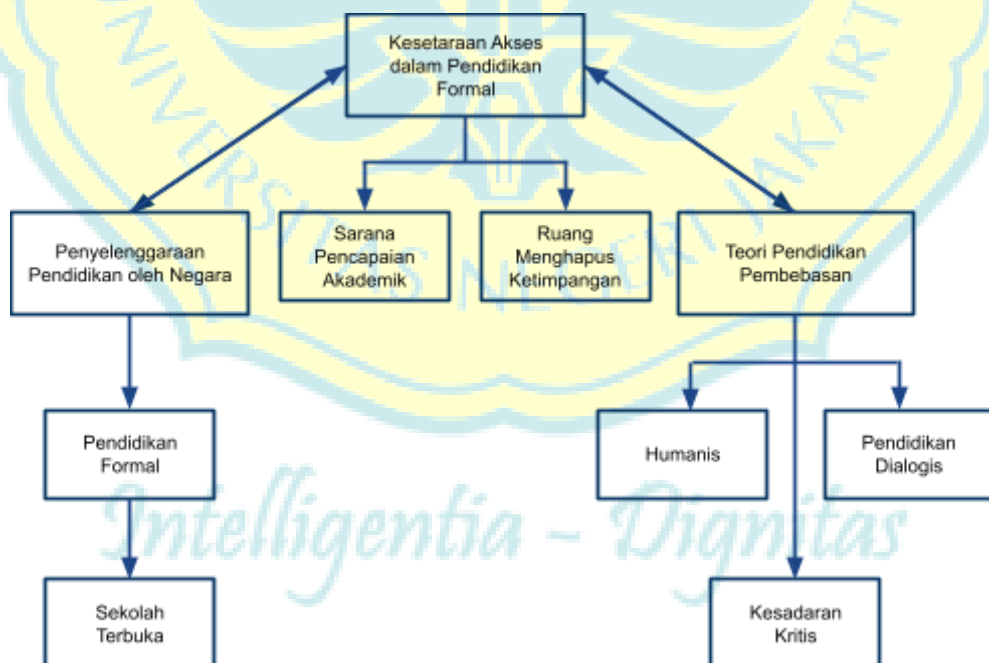
Skema 1.5 Teori Pembebasan Paulo Freire



Sumber: Olah Data Peneliti, 2025.

1.6.4 Hubungan antar Konsep

Skema 1.6 Hubungan antar Konsep



Sumber: Olah Data Peneliti, 2025.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendalami dan memahami makna yang disampaikan, baik oleh individu maupun kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan.⁴⁷ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian secara intensif dengan turut berpartisipasi di lapangan, mencatat semua hal yang terjadi selama di lapangan, melakukan analisis reflektif terhadap dokumen-dokumen di lapangan, lalu memasukkan data-data tersebut ke dalam laporan penelitian secara mendetail.⁴⁸ Pemilihan pendekatan kualitatif didorong oleh keinginan peneliti untuk menggali pemahaman secara lebih mendalam mengenai peran lembaga pendidikan formal dalam upaya pemerataan akses terhadap pendidikan. Di mana hal tersebut juga berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan upaya sekolah dalam mendorong semangat belajar para peserta didik. Dengan demikian, studi kasus dipilih sebagai metode dalam penelitian ini karena untuk menguraikan secara lebih rinci dan spesifik pada peran SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur sebagai salah satu lembaga pendidikan formal sebagai kesetaraan akses.

⁴⁷ John C. W. (2023). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Edisi Ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁴⁸ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan objek dalam penelitian yang akan diamati guna memperoleh informasi yang valid dan relevan untuk penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan yang berada di lingkup SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini, yaitu meliputi kepala, wakil, dan dua guru bina dari SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur yang juga memiliki jabatan yang sama di SMP Negeri 138 Jakarta Timur sebagai sekolah induk. Selain itu, terdapat informan pendukung yang meliputi enam peserta didik di SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Nama	Kategori	Usia	Domisili
1	Marsono, M.Pd.	Kepala Sekolah	57 tahun	Jakarta
2	Enggus Subarman, M.Pd.	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum & Kurikulum	51 tahun	Kp. Pisangan Bulak
3	Marjayadi, S.Pd.	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan & Guru Bina	55 tahun	Condet
4	Syarifuddin, S.Pd.	Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras-Humas & Guru Bina	55 tahun	Penggilingan
5	Christiani S.	Peserta Didik	15 tahun	Penggilingan

No	Nama	Kategori	Usia	Domisili
6	Ramdan Gusti A.	Peserta Didik	15 tahun	Penggilingan
7	Alvee Josias E.	Peserta Didik	15 tahun	Rawa Kuning
8	Kanaya Destriana P.	Peserta Didik	14 tahun	Penggilingan
9	Nabila Aprilia	Peserta Didik	14 tahun	Bulak
10	Nur Hayati	Peserta Didik	15 tahun	Pedaengan

Sumber: Olah Data Peneliti, 2025.

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian di dilakukan di SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur yang berinduk di SMP Negeri 138 Jakarta Timur. SMP Negeri 138 Jakarta Timur ini sendiri berlokasi di Jalan P. Komarudin, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung. SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur menjadi lokasi studi kasus dalam penelitian ini karena sebagai salah satu bentuk pendidikan formal kesetaraan akses sehingga menarik untuk dikaji secara lebih mendalam.

Penelitian ini dilakukan dalam periode waktu yang dimulai dari bulan Februari hingga Juni 2025. Dalam rentang waktu tersebut, memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dan pemahaman yang cukup komprehensif mengenai SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur sebagai salah satu bentuk pendidikan formal kesetaraan akses. Dengan demikian, menentukan SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur sebagai lokasi penelitian serta waktu untuk menjalankan penelitian yang tepat, peneliti dapat berkesempatan untuk mengkaji dan memberikan

pemahaman yang menyeluruh mengenai peran pendidikan formal sebagai kesetaraan akses, yang dalam konteks ini adalah SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur.

1.7.4 Peran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti peran utama dalam mengumpulkan data dan menyajikan hasil penelitian. Namun, secara lebih spesifik, peneliti melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan penelitian, serta pengumpulan, penganalisis, dan penginterpretasian data. Dalam perencanaan penelitian, peneliti menentukan topik yang meliputi konsep, sudut pandang, dan lokasi yang menjadi studi kasus untuk pendekatan dalam penelitian ini. Lalu, peneliti melakukan pelaksanaan penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data dan temuan yang nantinya akan diolah kembali dalam penulisan penelitian. Yang terakhir, yaitu dalam penulisan penelitian, peneliti menulis secara sistematis dan jelas dengan memasukkan data temuan yang telah diolah dan dianalisis, serta diinterpretasi dengan teori relevan yang telah ditentukan sebelumnya.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik-teknik tersebut digunakan untuk memperoleh baik data primer maupun data sekunder yang nantinya

akan menjawab pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya. Data primer diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan dan wawancara secara mendalam pada beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan data sekunder didapat melalui dokumentasi atau kepustakaan untuk mendukung keabsahan data primer nantinya.

1.7.5.1 Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian. Observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Peneliti akan mengamati secara langsung baik lokasi maupun subjek dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara menyeluruh SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur, yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pola interaksi dan karakteristik setiap warga sekolah, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Lalu, peneliti akan mencatat semua temuan yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang mendasar rinci, dan objektif terhadap fenomena yang akan diteliti tersebut.

1.7.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggali beberapa informasi yang akurat

melalui pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan terpilih yang telah disesuaikan berdasarkan target data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan informan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan tanpa terikat dengan pertanyaan yang telah ditentukan sehingga memberi kesempatan kepada para informan untuk memberikan pandangannya secara bebas.

1.7.5.3 Dokumentasi atau Studi Kepustakaan

Dokumentasi atau studi kepustakaan merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian. Data sekunder ini berperan untuk mendukung data primer yang dikumpulkan. Dokumentasi peneliti peroleh dari foto, video, catatan, dan dokumen internal baik dari SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur maupun pihak lain yang terkait. Sedangkan studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk memperoleh berbagai data melalui beberapa sumber, mulai dari buku, jurnal baik nasional maupun internasional, tesis atau disertasi, hingga artikel atau berbagai portal media.

Dalam hal ini, hasil penelitian akan menjadi semakin kredibel karena didukung oleh foto, video, catatan, dokumen internal, dan literatur yang telah ada.

1.7.6 Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian untuk memperkuat keabsahan temuan penelitian. Triangulasi diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda guna meningkatkan kredibilitas temuan penelitian yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, triangulasi data berasal dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Wilayah I. Dengan demikian, melalui informasi yang diperoleh dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Wilayah I sebagai triangulasi data dapat memperkuat keabsahan data yang diperoleh dari sumber lainnya.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti secara sistematis membaginya ke dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan ini dilakukan untuk mempermudah dalam pembahasannya sehingga diperoleh masing-masing bab yang terbagi menjadi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisi latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan literatur sejenis, kerangka konseptual, metodologi penelitian (pendekatan penelitian, subjek

penelitian, peran peneliti, teknik pengumpulan data, triangulasi data), dan sistematika penelitian.

Bab II Konteks Sosial dan Profil Penyelenggara & Peserta Didik SMP

Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur, Pada bab ini berisi konteks sosial SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur, yang meliputi latar belakang didirikan dan karakteristik peserta didiknya. Lalu, bab ini berisi gambaran umum mengenai SMP Negeri 138 Jakarta Timur sebagai sekolah induk dari SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur. Selain itu, bab ini juga berisi profil dari para informan yang telah ditentukan.

Bab III Peran SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur sebagai Lembaga Pendidikan Formal Kesetaraan Akses, Pada bab ini berisi hasil temuan penelitian mengenai fleksibilitas penyelenggaraan pendidikan hingga capaian pembelajaran spesifik yang menyesuaikan karakteristik peserta didik SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur.

BAB IV Peran SMP Terbuka Cakung 1 Jakarta Timur dalam Pelaksanaan Kesetaraan Akses sebagai Lembaga Pendidikan Formal melalui Teori Pendidikan Pembebasan, Pada bab ini berisi aspek pergeseran pada pendidikan dan analisis menggunakan teori pendidikan pembebasan.

BAB V Penutup, Pada bab ini berisi kesimpulan sebagai penutup dari penelitian ini.